



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

# MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,  
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
KOTA BANDA ACEH**

[mister@serambimekkah.ac.id](mailto:mister@serambimekkah.ac.id)

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology  
and Educational Research

## Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

Pages : 94–98

### Peran dan Tanggung Jawab Direksi dalam *Good Corporate Governance* di Perusahaan Terbuka

Akmal Haris, Rayhan Nizam Mahendra

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

#### Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2358>

#### How to Cite this Article

APA : Haris, A., & Nizam Mahendra, R. (2024). Peran dan Tanggung Jawab Direksi dalam Good Corporate Governance di Perusahaan Terbuka. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 94 – 98. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2358>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



## Peran dan Tanggung Jawab Direksi dalam *Good Corporate Governance* di Perusahaan Terbuka

Akmal Haris<sup>1</sup>, Rayhan Nizam Mahendra<sup>2</sup>

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang<sup>1,2</sup>

\*Email Korespodensi: [akmalhari427@students.unnes.ac.id](mailto:akmalhari427@students.unnes.ac.id)

Diterima: 13-11-2024

| Disetujui: 14-11-2024

| Diterbitkan: 15-11-2024

### ABSTRACT

*The board of directors plays a crucial role in implementing Good Corporate Governance (GCG) principles in publicly listed companies, which aim to enhance transparency, accountability, and fairness in corporate management. The primary responsibilities of the board include making strategic decisions, managing risks, and ensuring compliance with applicable laws and regulations. In this context, the board must act in good faith, responsibly, and consider the interests of all stakeholders, including shareholders, employees, and the wider community. Effective GCG implementation by the board not only contributes to increasing company value but also helps manage resources efficiently and effectively. However, challenges arise when not all board members fully understand their duties and responsibilities, which can lead to internal conflicts and disrupt company operations. Therefore, it is crucial for board members to have an in-depth understanding of GCG principles and apply them in every aspect of company management. Overall, the success of GCG implementation largely depends on the board's commitment to fulfilling its responsibilities. Thus, the role and responsibility of the board of directors are key to establishing sound and sustainable corporate governance.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance; Public Company*

### ABSTRAK

Direksi memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan terbuka, yang berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan. Tanggung jawab utama direksi meliputi pengambilan keputusan strategis, pengelolaan risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, direksi harus bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas. Penerapan GCG yang efektif oleh direksi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan, tetapi juga membantu dalam mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Namun, tantangan muncul ketika tidak semua anggota direksi memahami sepenuhnya tugas dan tanggung jawab mereka, yang dapat menyebabkan konflik internal dan mengganggu operasional perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi direksi untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya dalam setiap aspek manajemen perusahaan. Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan GCG sangat bergantung pada komitmen direksi untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan demikian, peran dan tanggung jawab direksi menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Tata Kelola Perusahaan yang Baik; Perusahaan Terbuka

## PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) adalah konsep yang penting dalam pengelolaan perusahaan, terutama bagi perusahaan terbuka, di mana direksi memiliki peran sentral dan strategis. Direksi bertanggung jawab tidak hanya dalam mengelola perusahaan tetapi juga dalam memastikan bahwa pengelolaan tersebut dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Tanggung jawab ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40

Tahun 2007, yang menyatakan bahwa direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan demi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip GCG yang harus diterapkan oleh direksi mencakup pengambilan keputusan strategis, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan keterbukaan informasi. Dalam pengambilan keputusan strategis, direksi harus mempertimbangkan keuntungan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang dengan melakukan analisis risiko yang cermat dan memahami pasar serta lingkungan bisnis. Terkait pengelolaan risiko, direksi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko finansial, operasional, hukum, dan reputasi yang dapat memengaruhi keberlangsungan perusahaan. Direksi juga wajib memastikan kepatuhan perusahaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi hukum bagi perusahaan maupun anggota direksi secara individu. Aspek keterbukaan informasi mengharuskan direksi menyediakan informasi akurat dan tepat waktu tentang kinerja perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lain untuk menghindari potensi penyesatan informasi.

Namun, penerapan GCG sering kali menghadapi tantangan akibat minimnya pemahaman anggota direksi mengenai tanggung jawab mereka, yang dapat memicu konflik internal dan mengganggu efektivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi anggota direksi untuk terus meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip GCG serta menerapkannya di setiap aspek manajemen. Keberhasilan penerapan GCG sangat bergantung pada komitmen direksi dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Dengan demikian, peran dan tanggung jawab direksi menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan. Tulisan ini akan membahas lebih lanjut tantangan yang dihadapi direksi dalam menerapkan GCG dan langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasinya.

## PEMBAHASAN

Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar penting dalam pengelolaan perusahaan modern, terutama bagi perusahaan terbuka yang memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan publik dan memenuhi ekspektasi berbagai pemangku kepentingan. Penerapan GCG bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Direksi sebagai organ utama dalam struktur perusahaan memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan keberhasilan implementasi prinsip-prinsip GCG. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas operasional sehari-hari, tetapi juga dalam pengambilan keputusan strategis yang berpengaruh terhadap keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menggarisbawahi bahwa direksi memiliki kewenangan penuh atas pengurusan perusahaan. Kewenangan

ini bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban yang menuntut akuntabilitas penuh dari setiap anggota direksi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip GCG menjadi sangat penting. Prinsip-prinsip utama dalam GCG mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemegang saham dan publik, sehingga menghindari misinformasi yang dapat menurunkan kepercayaan pasar.

Dalam aspek akuntabilitas, direksi harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, baik secara internal kepada dewan komisaris maupun secara eksternal kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas ini mencakup pengelolaan risiko yang menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan strategis. Direksi harus memiliki mekanisme yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang berpotensi mengganggu operasional perusahaan. Risiko yang dihadapi bisa berasal dari berbagai aspek, seperti risiko keuangan yang terkait dengan fluktuasi pasar, risiko operasional yang muncul dari kesalahan prosedur atau sistem, risiko hukum yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap regulasi, serta risiko reputasi yang dapat merusak citra perusahaan di mata publik.

Responsibilitas atau tanggung jawab dalam konteks GCG menekankan pentingnya kepatuhan direksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi harus memastikan bahwa semua kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar etika yang diterapkan di industri. Hal ini sangat penting untuk menghindari sanksi hukum yang dapat merugikan perusahaan baik secara finansial maupun reputasi. Selain itu, direksi juga perlu mengedepankan prinsip independensi, di mana setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan objektif dan bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Independensi ini sangat penting untuk menjaga integritas proses pengambilan keputusan dan menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Prinsip keadilan dalam GCG berfokus pada perlakuan yang setara dan adil bagi semua pemegang saham dan pemangku kepentingan. Direksi harus memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi yang diperlukan secara proporsional dan tidak ada yang diistimewakan dalam hal akses informasi atau keputusan strategis. Penerapan prinsip keadilan ini akan membantu dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Namun, penerapan GCG tidak terlepas dari berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh direksi. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran anggota direksi mengenai pentingnya GCG. Banyak direksi yang masih memandang GCG sebagai sekadar formalitas atau persyaratan regulasi, tanpa menyadari dampak positif yang dapat dihasilkan dari penerapan yang konsisten. Hal ini sering kali menyebabkan implementasi GCG tidak optimal, yang berujung pada rendahnya tingkat kepercayaan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Tantangan lainnya adalah adanya konflik kepentingan yang sering kali muncul dalam pengambilan keputusan strategis. Direksi harus dapat menjaga independensi dalam membuat keputusan, terlepas dari tekanan yang mungkin datang dari pihak eksternal atau bahkan dari dalam perusahaan. Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak integritas dan efektivitas penerapan GCG, sehingga mengancam keberlanjutan perusahaan.

Selain itu, keterbatasan dalam sistem pengawasan dan evaluasi juga menjadi salah satu kendala dalam penerapan GCG yang efektif. Perusahaan perlu memiliki sistem monitoring yang baik untuk

mengawasi implementasi GCG dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja direksi. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dalam hal ini, peran dewan komisaris sebagai pengawas juga menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, perusahaan perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan pemahaman anggota direksi melalui pelatihan dan edukasi tentang prinsip-prinsip GCG dan pentingnya tata kelola yang baik dalam menciptakan nilai jangka panjang. Kedua, perusahaan perlu memperkuat mekanisme pengawasan dengan melibatkan dewan komisaris dan komite audit secara lebih aktif dalam proses evaluasi dan pemantauan kinerja direksi. Ketiga, membangun budaya perusahaan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis, sehingga semua pihak dalam perusahaan memahami pentingnya menerapkan GCG dalam setiap aspek manajemen.

Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan GCG sangat bergantung pada komitmen dan integritas direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan menerapkan GCG yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, mengurangi risiko, dan memperkuat reputasi di mata pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan nilai yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang.

## KESIMPULAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan elemen penting dalam pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adil. Direksi memiliki peran sentral dalam memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan dengan baik, mulai dari pengambilan keputusan strategis hingga pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi. Implementasi GCG yang efektif tidak hanya meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan tetapi juga membangun kepercayaan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, penerapan GCG sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman anggota direksi tentang prinsip-prinsip GCG, konflik kepentingan, serta keterbatasan sistem pengawasan dan evaluasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya strategis seperti peningkatan edukasi dan pelatihan bagi direksi, penguatan mekanisme pengawasan oleh dewan komisaris, serta pembentukan budaya perusahaan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Dengan komitmen yang kuat dari direksi, penerapan GCG yang konsisten akan meningkatkan nilai perusahaan, mengurangi risiko operasional, dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan GCG menjadi faktor kunci dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

## SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Good Corporate Governance (GCG), perusahaan perlu fokus pada beberapa aspek penting. Pertama, perusahaan disarankan untuk secara rutin mengadakan pelatihan dan edukasi mengenai prinsip-prinsip GCG bagi anggota direksi. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap pentingnya tata kelola yang baik, sehingga

mereka dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi melalui peran aktif dewan komisaris dan komite audit. Pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa penerapan GCG berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan membantu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Perusahaan juga disarankan untuk membangun budaya kerja yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap anggota organisasi merasa bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, mengurangi risiko, dan membangun kepercayaan dari pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (2007). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.). *Pedoman penerapan Good Corporate Governance untuk perusahaan terbuka*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Trisnadi, A. (2020). *Good Corporate Governance: Teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharto, B. (2019). Pengelolaan risiko dalam Good Corporate Governance. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 12(1), 45–60.
- Halim, M., & Rahman, A. (2021). Akuntabilitas direksi dalam implementasi Good Corporate Governance. *Jurnal Manajemen*, 15(2), 78–90.
- Santoso, R. (2018). Tantangan penerapan Good Corporate Governance di perusahaan terbuka. *Jurnal Tata Kelola Perusahaan*, 10(3), 112–125.
- Yusuf, A., & Putri, N. (2022). Budaya perusahaan dan penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 14-20